

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Audit**

##### **2.1.1 Definisi Audit**

Menurut Arens et al (2017:4), “audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Auditing juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten, indenpen, dan berintegritas”.

Menurut Mulyadi (2017:8), “auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut”

Arens, Elder, Beasley dan Hogan (2019) mendefinisikan “Audit sebagai akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan”.

Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan (PSAK), menurut PSAK “Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi yang dikumpulkan atas pernyataan tentang berbagai aktivitas dan kejadian – kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat korelasi antara pernyataan yang ada pada lapangan serta

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan konfirmasi”

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu yang berkompeten dan independen untuk memperoleh penilaian seberapa baik informasi terkini sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, dengan menggunakan bukti objektif yang diperiksa.

### 2.1.2 Tujuan Audit

Menurut (Arens, et al., 2015), “terdapat enam tujuan umum yang berkaitan dengan transaksi dan delapan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Terdapat perbedaan antara keduanya, akan tetapi kedua tujuan berkaitan dengan erat. Tujuan audit dengan transaksi diterapkan terhadap kelas-kelas transaksi seperti penjualan atau pengeluaran kas, sedangkan tujuan audit dengan saldo diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun laporan posisi keuangan. Auditor tidak hanya memverifikasi saldo akun itu sendiri, tetapi juga mengumpulkan bukti pendukung yang terkait dengan rincian saldo akun tersebut” Delapan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yaitu:

1. Keakuratan (*accuracy*), untuk memastikan bahwa semua informasi dan data yang berkaitan dengan transaksi telah tercatat sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
2. Keterjadian (*existence*), bertujuan untuk memeriksa apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi.
3. Klasifikasi (*classification*), untuk memeriksa apakah transaksi telah tercatat dalam klasifikasi akun yang tepat.
4. Kelengkapan (*completeness*), untuk memeriksa semua transaksi yang seharusnya dicatat sudah benar-benar dicatat dan tepat pada pencatatannya.
5. Pisah Batas (*cut off*), bertujuan memeriksa bahwa semua transaksi telah tercatat sesuai periode pembukuan yang tepat.

6. Hubungan yang rinci (detail *Tie-in*), merupakan rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total buku besar.
7. Hak dan kewajiban, bertujuan memeriksa apakah penyajian aset menjadi hak perusahaan dan utang menjadi kewajiban perusahaan.
8. Realisasi Nilai, bertujuan memeriksa pada saldo akun apakah telah mencerminkan nilai realisasi bersih.

### **2.1.3 Jenis - Jenis Audit**

Jenis audit menurut Bayangkara (2015:4) dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1) Audit laporan keuangan

Merupakan audit yang dilakukan oleh independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya, untuk menentukan apakah laporan keuangan *auditee* telah disusun sesuai prinsip-prinsip berterima umum (PABU).

2) Audit kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan menentukan kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur dan rencana. Audit ini bisa dilakukan oleh auditor internal atau eksternal, dan penerima laporan audit ialah manajemen perusahaan dan pemerintah.

3) Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh auditor perusahaan. Penerima laporan hasil audit internal adalah manajemen perusahaan. Tujuan audit internal yaitu:

- a) Menilai jika ada kendala laporan keuangan.
- b) Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur.
- c) Menilai pengendalian internal perusahaan.
- d) Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

#### 4) Audit Operasional (Manajemen)

Audit operasional bisa dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal. Perusahaan merupakan penerima pelaporan audit. Tujuan dari operasi audit adalah untuk membantu. Manajemen organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomi operasi organisasinya.

### 2.1.4 Bukti Audit

Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya.

Menurut (Arens, et al., 2015) auditor memiliki masing-masing untuk menemukan bukti audit, terdapat 8 jenis yaitu:

#### 1. Pemeriksaan fisik

Auditor melakukan audit atas aset riil, jenis bukti ini biasanya digunakan untuk akun aset tetap, saham, dan kas.

#### 2. Konfirmasi

Auditor memerlukan tanggapan tertulis dari pihak independen untuk memverifikasi keakuratan informasi tersebut. Kelemahan dari jenis bukti ini adalah biayanya mahal dan permintaan kepada pihak ketiga seringkali tidak tepat.

#### 3. Inspeksi

Pemeriksaan dokumen dan catatan yang dimiliki klien sehubungan dengan informasi dalam laporan keuangan.

#### 4. Pelaksanaan ulang

Auditor memeriksa tindakan pelanggan. Proses manajemen akuntansi dan pemantauan internal pelanggan terkait dengan proses audit.

#### 5. Rekalkulasi

Saat melakukan perhitungan ulang ini, auditor harus memeriksa kembali faktur untuk memastikan bahwa faktur klien akurat.

## 6. Observasi

Observasi yang dilakukan saat klien mengunjungi pabrik atau kantor, auditor dapat mengamati dan mengevaluasi jenis dokumentasi ini.

## 7. Prosedur analitis

Auditor akan memeriksa data antara bidang keuangan dan non keuangan selama proses analisis. Informasi yang digunakan berasal dari neraca tahun lalu dan tahun berjalan.

## 8. Wawancara dengan klien

Auditor mengajukan berbagai pertanyaan kepada klien untuk panduan lebih lanjut. Jika jawaban klien tidak diperoleh dari sumber independen, kesimpulan ini harus didukung oleh bukti lebih lanjut.

### **2.1.5 Standar Auditing**

Standar auditing merupakan sepuluh standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:150.1 – 150.2) yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

#### 1. Standar umum

Standar umum bersifat pribadi yang mana mengatur tentang pribadi auditor, mengenai persyaratan kompetensi, sikap serta profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan pelaporan.

- a. Standar umum pertama berbunyi, “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (kompetensi).”
- b. Standar umum yang kedua berbunyi, “Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi (independent).”
- c. Auditor harus menggunakan kemahirannya dengan cermat dan hati-hati saat melakukan audit dan menyusun laporan.

## 2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Seluruh pekerjaan audit harus dilaksanakan sebaik-baiknya, direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disuspensi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan.
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, mulai dari perencanaan, supervisi, pemahaman dan pengevaluasian pengendalian intern, pengumpulan bukti sampai dengan selesainya pemeriksaan di lapangan.

## 3. Standar pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka

alasan nya harus dinyatakan. “Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor” (IAI, 2001:150.1 & 150.2).

Standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menyusun laporan auditnya.

### 2.1.6 International Standards on Auditing (ISA)

Standar auditing yaitu untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit laporan keuangan historis, standar audit mencakup pertimbangan kualitas profesional seperti kompetensi dan independen, persyaratan pelaporan, dan bukti (Arens, 2014:36).

Salah satu standar audit yang dibuat oleh Dewan Standar Audit dan Asuransi Internasional (IAASB), yang dibentuk oleh *International Federation of Accountants* (IFAC), adalah *International Standards on Auditing* (ISA). IFRS adalah organisasi profesi akuntansi sedunia dengan lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia dan 167 organisasi anggota di 127 negara. Indonesia mengadopsi ISA sebagai bagian dari komitmennya sebagai anggota G-20 dan memiliki tanggung jawab untuk mendorong semua anggota negaranya untuk menggunakan standar profesi internasional. Salah satu cara untuk menjalankan amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah dengan menggunakan ISA ini sebagai tanggapan terhadap rekomendasi dari World Bank

**Tabel 2.1.5**

#### **Daftar *International Standards on Auditing* (ISA)**

<b>ISA 200-265</b>	<b>Prinsip-Prinsip Umum dan Tanggung Jawab</b>
200	Tujuan umum auditor independen dan pelaksanaan suatu audit sesuai dengan standar perikatan audit.

210	Persetujuan atas persyaratan audit perikatan.
220	Pengendalian kualitas audit atas laporan keuangan.
230	Dokumentasi hasil audit.
240	Tanggung jawab auditor berhubungan dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan.
250	Pertimbangan undang-undang audit laporan keuangan.
260	Komunikasi dengan pihak yang menangani tata kelola.
265	Tidak cukup komunikasi tentang pengendalian internal kepada mereka yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola.
<b>ISA 300-450</b>	<b>Penilaian Risiko dan Respons Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai</b>
300	Perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan.
315	Pengindentifikasian dan evaluasi potensi risiko salah saji material.
320	Materi untuk pelaksanaan dan perencanaan audit.
330	Respon auditor terhadap risiko yang dievaluasi.
402	Pertimbangan audit untuk entitas yang memanfaatkan suatu organisasi jasa.
450	Pengevaluasian kesalahan penyajian yang ditemukan selama audit ISA.
<b>ISA 500-580</b>	<b>Bukti Audit</b>
500	Bukti Audit.
501	Bukti audit yang menunjukkan pertimbangan khusus untuk komponen pilihan.
505	Konfirmasi dari sumber luar.
510	Perikatan audit dari saldo awal tahun pertama.
520	Prosedur analitis.
530	Sampling audit.
540	Evaluasi estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan terkait.
550	Pihak berhubungan.



560	Peristiwa kemudian.
570	Kelangsungan usaha.
580	Representasi tertulis ISA
<b>ISA 600-620</b>	<b>Penggunaan jasa pihak ketiga</b>
600	Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan kelompok (termasuk tugas auditor komponen).
610	Penggunaan fungsi auditor internal.
620	Penggunaan profesional auditor ISA.
<b>ISA 700-720</b>	<b>Kesimpulan audit dan pelaporan</b>
700	Perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan.
705	Modifikasi yang diubah tentang laporan auditor independen.
706	Paragraf-paragraf tertentu dalam laporan auditor independen.
710	Informasi yang sebanding, termasuk angka korespondensi dan laporan keuangan yang sebanding.
720	Tanggung jawab auditor terkait dengan data tambahan dalam berisi laporan keuangan audit.

**Sumber: Audit Berbasis ISA**

ISA telah dibuat dengan tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memberikan perspektif hukum yang adil. Pemerintah mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, untuk membuat laporan keuangan yang baik untuk pihak yang berkepentingan.

Dalam buku Tuanakotta (2014: 10-13) yang berjudul Audit Berbasis ISA dijelaskan “bahwa ada lima perbedaan substansial dan mendasar antara ISA dan SPAP” Perbedaan ini meliputi:

1. Menekankan pada Audit Berbasis Risiko ISA

Berbasis bahwa auditor harus memahami konsep risiko di setiap tahap audit, mulai dari menilai risiko (*to assess risk*), menanggapi risiko yang dinilai (*to respond to assessed risk*), dan mengevaluasi risiko yang ditemukan (*to detect risk*).

2. Perubahan dari *Rules Based* ke *Principle Based*

ISA dan IFRS adalah standar berdasarkan prinsip (*principles-based standard*) merupakan perbedaan yang signifikan dari standar sebelum yang berbasis aturan (*rules-based standard*).

3. Beralih dari Model Matematis

ISA merupakan penggunaan keputusan professional judgement bukan lagi dengan model matematis.

4. Menekankan Kearifan Profesional (*Professional Judgement*)

ISA mempengaruhi partisipasi auditor keahlian dengan menekankan pentingnya menggunakan keahlian. Jika keputusan tentang audit terus dibuat oleh asisten dengan pengalaman yang tidak memadai, audit tidak akan disetujui oleh ISA.

5. Melibatkan peran *Those Charged With Governance* (TCWG)

ISA yang menekankan berbagai tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas dan organisasi manajemen. Namun, untuk mengembangkannya, diperlukan individu atau lembaga dengan otoritas yang cukup untuk mengawasi organisasi. Mereka adalah TCWG, dan auditor harus

berkomunikasi dengan mereka jika ada anggota atau lembaga TCWG dalam entitas tersebut.

Persepsi responden terhadap indikator penerapan ISA, yang merupakan variabel independen yang diukur dengan skala likert empat poin, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip umum dan tanggung jawab
2. Penilaian risiko
3. Bukti audit
4. Penggunaan pekerjaan pihak lain
5. Kesimpulan dan laporan.

### **2.1.7 Jenis-jenis Opini Audit**

#### **1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**

Opini wajar tanpa pengecualian adalah auditor yang setuju dengan laporan keuangan manajemen dianggap sebagai opini objektif. Jika auditor tidak mendeteksi kesalahan yang signifikan dalam keseluruhan laporan keuangan, hal ini diberikan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK).

#### **2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**

Pendapat auditor yang menyatakan keberatan tertentu terhadap salah satu perkiraan dalam laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkiraan yang disampaikan manajemen.

#### **3. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**

Auditor yang tidak setuju dengan ikhtisar keuangan manajemen disebut opini tidak wajar karena memiliki keyakinan yang kuat bahwa ikhtisar tersebut tidak layak. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar setelah melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat selama proses audit.

#### **4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)**

Auditor tidak menyimpulkan bahwa dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi mungkin timbul terhadap laporan keuangan dapat

bersifat material dan pervasif, jika dia tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari kesimpulan auditnya.

#### 5. Opini Penolakan (*Disclaimer Opinion*)

Penolakan memberikan pendapat tentang laporan keuangan manajemen karena sedikit penelitian atau ketidakpastian tentang berapa banyak perkiraan yang benar.

## 2.2 Tahapan Audit

Menurut (Tuanakotta, 2015) bahwa proses audit terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu: Penilaian risiko (*risk assessment*), Menanggapi risiko (*risk response*), pelaporan (*reporting*).

### 2.2.1 Penilaian Risiko (*risk assessment*)

Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah utama dalam tahap audit pertama terdiri atas berikut ini:

- a. Memutuskan untuk menerima (jika penugasan atau perikatan audit pertama) melanjutkan (jika penugasan atau perikatan audit kedua).
- b. Merencanakan audit, langkah kedua dalam perencanaan audit adalah menentukan materialitas, menjadwalkan pertemuan dengan tim audit.
- c. Membangun strategi audit menyeluruh. Tujuan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi salah saji di tingkat laporan keuangan dan asersi akibat kecurangan dan kesalahan. Langkah ketiga ini dapat dijelaskan dalam: identifikasi penilaian risiko bawaan, identifikasi penilaian risiko pengendalian, mengomunikasikan kekurangan yang ditemukan sebagai hasil pelaksanaan prosedur risiko.
- d. Dokumentasikan temuan perubahan atas rencana audit semula.

### 2.2.2 Menanggapi Risiko (*risk response*)

Menanggapi risiko merupakan tahapan kedua dalam proses audit, tujuannya adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai risiko yang dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan merancang dan

mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap risiko salah saji yang dinilai, pada tingkat laporan keuangan maupun asersi. Auditor melakukan pendekatan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Menangani setiap risiko yang dinilai, secara bergantian sesuai dengan sifatnya (misalnya, ketika perekonomian sedang menurun) dan dengan merancang tanggapan audit yang tepat dalam bentuk prosedur audit yang selanjutnya.
2. Menangani setiap risiko yang dinilai, sesuai dengan materialitas dari area laporan keuangan atau *disclosure* yang terkena dampak risiko tersebut. auditor kemudian merancang tanggapan dalam bentuk prosedur audit selanjutnya yang tepat.
3. Memulai dengan daftar prosedur audit baku untuk setiap area laporan keuangan dan asersi yang material dan membuat penyesuaian (menambah, memodifikasi, dan mengeliminasi prosedur) untuk merancang tanggapan yang tepat terhadap risiko yang dinilai.

Langkah awal untuk merancang tanggapan audit yang efektif adalah dengan membuat daftar risiko yang telah dinilai dan dikembangkan pada akhir tahap penilaian risiko. Selanjutnya tanggapan menyeluruh, yaitu risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan (seperti kelemahan lingkungan pengendalian atau potensi terjadinya kecurangan yang dapat berdampak terhadap banyak asersi) ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor.

Faktor penting dalam menentukan luasnya suatu prosedur audit ialah *performance materiality* atau materialitas pelaksanaan, hal ini ditetapkan untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan dimodifikasi untuk memperhitungkan risiko tertentu berkaitan dengan saldo akun, transaksi, atau *disclosure* dalam laporan keuangan. Secara umum luasnya prosedur audit ditentukan (seperti banyaknya sampel yang diuji, atau seberapa rinci prosedur analitikal substantif) akan meningkat dengan meningkatnya risiko salah saji material.

### 2.2.3 Pelaporan (*reporting*)

Melaporkan laporan keuangan sesuai dengan *International Standard on Auditing* (ISA), sesuai dengan temuan auditor. Mengevaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan dan membuat laporan adalah tahap terakhir dari proses audit ini. Konsep-konsep utama yang relevan dengan tahap ketiga proses audit ini sebagai berikut:

- a. Peristiwa kemudian
- b. Kestinambungan usaha
- c. Mendokumentasikan pekerjaan audit
- d. Merumuskan opini auditor, dan
- e. Komunikasi dengan *those charged with governors* (TCWG).

## 2.3 Prosedur

### 2.3.1 Definisi Prosedur

Prosedur sebagai pedoman untuk menentukan aktivitas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan fungsi tertentu. Struktur prosedur yang memadai memungkinkan organisasi mencapai tujuan dan tata kelolanya secara efektif.

Menurut Narko dalam (Wijaya & Irawan,2018) “Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *clerical* yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”

Menurut Ardiyos dalam (Wijaya & Irawan, 2018) “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian Tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dilaksanakan secara seragam”

## 2.4 Konsep Utang Usaha

### 2.4.1 Definisi Utang Usaha

Menurut Sukrisno Agoes (2012) “Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan dimasa lalu”. Pengertian Hutang Usaha menurut Sukrisno Agoes (2012) yaitu “Hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan”.

Menurut Rudianto (2011:275) pengertian “Hutang dalam bukunya Pengantar Akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa lalu”. Pengertian Hutang Usaha menurut Rudianto (2011:275) adalah “Hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan”. Misalnya, pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan hutang usaha bagi perusahaan.

Liabilitas Kontinjensi didefinisikan dalam PSAK 57 (2012) sebagai (paragraph 10) :

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena (a) tidak terdapat kemungkinan besar perusahaan mengeluarkan sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau (b) jumlah kewajiban tersebut tidak bisa diukur secara handal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang usaha adalah suatu perusahaan sangatlah penting untuk diperiksa karena utang usaha adalah yang paling sensitif untuk diketahui banyak orang.

### 2.4.2 Audit atas Akun Utang

Akun utang usaha ini memerlukan audit karena pada akun ini sering terjadi kecurangan yang dilakukan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada kesalahan serius, itu akan merugikan masa depan perusahaan. Auditor perlu melakukan pengujian substantif dan pengendalian karena mereka menggunakannya. Tahapan untuk audit akun utang usaha menurut (Arens, et al., 2015) yaitu:

1. Auditor menemukan risiko terhadap hubungan bisnis pelanggan karena dampaknya terhadap laporan bank perusahaan. Risiko ini diidentifikasi melalui survei eksekutif, bagan alur, atau narasi. Jika auditor menemukan bahwa pengendalian internal perusahaan baik, substansi audit akun perusahaan mungkin terbatas.
2. Menetapkan materialitas dan menilai risiko inheren kewajiban korporasi sehingga auditor dapat menentukan tingkat toleransi kesalahan yang relatif tinggi (*tolerable misstatement*).
3. Auditor dapat menilai dan meninjau pengendalian internal organisasi ketika menilai risiko manajemen terhadap siklus pembayaran dan penerimaan. Auditor membutuhkan sedikit bimbingan jika manajemen organisasi berfungsi dengan baik.
4. Perencanaan dan pelaksanaan uji control dan substansi untuk siklus pembelian dan pembayaran. Auditor harus *mereview* jurnal akuntansi perusahaan, menghitung total utang yang dimuat dalam laporan, kemudian membandingkan saldo utang tahun berjalan dengan saldo utang tahun sebelumnya. Auditor kemudian harus memverifikasi jumlah total yang terhutang kepada pemasok.
5. Merencanakan dan menganalisis saldo hutang perusahaan. Auditor harus menganalisis neraca perusahaan untuk menemukan kesalahan saat pemeriksaan audit. Jika Anda ingin memastikan bahwa tidak ada entri ganda, karena hal ini dapat mempengaruhi saldo akun perusahaan, penting untuk membuat perbandingan antara saldo hutang tahun lalu agar tidak ada double entry.



6. Jadwalkan audit atas saldo keseluruhan perusahaan untuk memenuhi tujuan audit. Auditor harus fokus pada item yang belum dicatat atau dihapus dengan benar dan memastikan akun disajikan dengan benar.

### 2.4.3 Prosedur Utang Usaha

Menurut (Sukrisno Agoes,2012) prosedur pemeriksaan utang usaha, yaitu:

- a) Evaluasi dan Pelajari internal control atas utang usaha.
- b) Meminta Rincian data utang usaha dan menyesuaikan saldonya dengan saldo utang di buku besar.
- c) Untuk menyesuaikan saldo utang usaha masing-masing *supplier* dengan saldo *subsidiary ledger* utang usaha jika jumlah suppliernya banyak, tidak perlu 100%.
- d) Sampling harus dilakukan dalam pemeriksaan bukti pendukung yang terdapat dari saldo hutang ke beberapa suppliernya, perlu diperhatikan juga jumlahnya sudah cocok dengan *purchase requisition*, *purchase order*, *receiving report* dan *supplier invoice*.
- e) Mengirim konfirmasi kepada beberapa *supplier* baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.
- f) Memeriksa tanggal setelah pembayaran di laporan posisi keuangan (neraca) (*subsequent payment*) untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat (*unrecorded liabilities*) per tanggal laporan posisi keuangan (neraca).
- g) Jika terdapat *monthly statement of account* dari supplier maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut *monthly statement of account* dengan saldo *subsidiary ledger* utang.
- h) Jika memiliki hutang bank dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit *overdraft*, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buat kutipan (*excerpt*) dari perjanjian kreditnya, dan periksa otorisasi direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.

- i) Jika ada saldo debit dari utang usaha maka harus diperiksa apakah ini uang muka pembelian atau adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi, jika jumlahnya besar (material) harus direklasifikasi sebagai piutang.